

**SURABAYA SEBAGAI KOTA ADIPURA PADA MASA KEPEMIMPINAN POERNOMO KASIDI  
PADA TAHUN 1984 – 1994****DELA EKA PUSPITASARI**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [delapuspitasari@mhs.unesa.ac.id](mailto:delapuspitasari@mhs.unesa.ac.id)

**Agus Trilaksana**

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Pembangunan tidak akan lepas dari peranan sumber daya alam sebagai peletak dasar adanya kehidupan, begitu juga pembangunan di Surabaya. Surabaya adalah salah satu kota yang mengalami fase perkembangan melalui pembangunan yang menyeimbangkan dengan lingkungan. Surabaya adalah kota metropolitan yang sarat akan potensi pengembangan kota dan tingginya urbanisasi. Meningkatnya jumlah penduduk menimbulkan permasalahan khas perkotaan yang lebih kompleks yaitu masalah kebersihan dan keindahan kota, termasuk diantaranya adalah masalah persampahan dan perkampungan yang tergolong kumuh. Permasalahan tersebut tentunya akan menghambat perkembangan pembangunan, maka dari itu pemerintah mengembangkan konsep pembangunan yang selaras dengan lingkungan hidup sehingga akan tercipta keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan. Dalam mendukung penyeimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan, pemerintah pusat memberikan apresiasi berupa penghargaan Adipura yang menjadi lambang supremasi terhadap kota yang dinilai memiliki tingkat kebersihan yang tinggi. Rumusan masalah yang kemudian muncul sebagai bahan penelitian adalah (1) Bagaimana kebijakan Walikotamadya Surabaya Poernomo Kasidi dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Surabaya ? (2) Bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah Walikotamadya Surabaya Poernomo Kasidi untuk menjadikan Surabaya sebagai kota Adipura ? (3) Bagaimana dampak dari kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah Walikota Surabaya bagi perkembangan kota Surabaya ?. Permasalahan tersebut dikaji berdasarkan sumber yang telah ditelaah. Pemerintah Walikotamadya Surabaya Poernomo Kasidi dalam masa baktinya melakukan beberapa program untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu Program Perbaikan Kampung, Program Kebersihan dan Keindahan Kota serta Program Kali Bersih. Program-program tersebut berdampak pada keberhasilan Surabaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asrih sehingga mendorong Surabaya untuk memperoleh penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yaitu penghargaan Adipura dapat membantu untuk mempercepat laju pembangunan di Surabaya.

**Kata Kunci:** *Lingkungan Hidup, Surabaya, Adipura*

**Abstract**

Development will not be separated from the role of natural resources as the foundation stone of their lives, as well as development in Surabaya. Surabaya is one of the cities that experienced a phase of development through the construction of the balance with the environment. Surabaya is a metropolis full of the high development potential of the city and urbanization. Increasing population pose a typical urban problems are more complex is the problem of cleanliness and beauty of the city, including the problems of waste and settlements classified as slums. Those problems will certainly hinder the progress of development, therefore the Government to develop the concept of development in harmony with the environment that will create a balance between environment and development. In support of balancing between environment and development, the central government gave Adipura appreciation form the supreme symbol of the city which is considered to have a high level of hygiene. The problems that then arise as research material is (1) How does the mayor of Surabaya Purnomo Kasidi policies in addressing environmental issues in Surabaya ? (2) how the implementation of government policies Surabaya municipality Purnomo Kasidi to make Surabaya as city clean city? (3) What is the impact of environmental policies adopted by the government for the development of the town mayor of Surabaya ?. The problems studied by sources that have been reviewed. Government of Surabaya municipality Kasidi Purnomo in his tenure has conducted several programs to address environmental issues, namely Kampung Improvement Program, Program Hygiene and City Beautification and Clean River Program. Such programs have an impact on the success of Surabaya to create a clean environment and asrih prompting Surabaya to earn the highest award in the environmental field is Adipura can help to accelerate the pace of development in Surabaya.

**Keywords:** *Environment, Surabaya, Adipura*

## PENDAHULUAN

Surabaya adalah salah satu kota yang mengembangkan pembangunan melalui penyeimbangan terhadap lingkungan hidup<sup>1</sup> karena pada dasarnya keberadaan manusia tidak lepas dari peranan lingkungan hidup disekitarnya sebagai penyedia sarana pembangunan. Manusia akan mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia juga akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Kondisi yang saling mempengaruhi ini akan menimbulkan banyak permasalahan terutama permasalahan pada lingkungan hidup. Ketidakserasian manusia dan lingkungan hidupnya akan mendorong terganggunya kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam banyak mengalami tekanan selama proses pembangunan. Proses pembangunan yang meningkat menjadi semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya alam yang semakin banyak. Pembangunan yang tidak diimbangi dengan pemahaman tentang lingkungan hidup akan menimbulkan masalah pada lingkungan seperti persampahan, pencemaran, kebisingan dan sebagainya.

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh Negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan akan mendorong pengurusan terhadap sumber daya alam sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan<sup>2</sup>. Jumlah hutan Negara semakin berkurang, sedangkan lautan dan sungai semakin kotor karena banyak dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat pembuangan.

Surabaya termasuk sebagai salah satu kota terpenting dalam perkembangan sejarahnya. Surabaya yang berada dalam lingkup strategis. Surabaya mendominasi perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur dan jaringan komersialnya sampai ke Singapura dan Asia Timur<sup>3</sup>. Pentingnya Surabaya dalam ranah jalur perekonomian membuat Surabaya berkembang menjadi kawasan mega-urban atau *Extended Metropolitan Regional (EMR)*<sup>4</sup>. Banyaknya arus urbanisasi memicu ledakan penduduk. Pertambahan penduduk yang di luar

batas wajar akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Jumlah penduduk yang meningkat tentunya akan berdampak pada pola hidup masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perkembangan teknologi juga akan mendorong semakin banyaknya pemanfaatan terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan lingkungan hidup sekitarnya.

Kepadatan penduduk juga akan menyebabkan tingginya permintaan akan lahan huni. Arus urbanisasi tersebut menimbulkan pengaruh baik positif maupun negative bagi wilayah perkotaan. Banyaknya masyarakat yang bergairah terhadap laju ekonomi akan membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi sedangkan mengalirnya penduduk ke kota tanpa bekal pengetahuan dan materi akan memicu timbulnya masyarakat miskin di perkotaan seperti banyaknya gelandangan, pengemis dan sebagainya yang akan menghuni kampung-kampung liar yang cenderung kotor dan bahkan tidak pantas disebut sebagai tempat tinggal.

Kerusakan lingkungan di Negara berkembang bukan saja karena faktor kemiskinan tetapi juga karena keinginan untuk menjadi Negara mandiri dan maju melalui proses industrilisasi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Limbah rumah tangga dan polusi industri dapat mencemari lingkungan hidup yang berdampak pada kualitas pertumbuhan kota. Lingkungan tidak lepas dari kehidupan manusia, selain untuk mendukung laju kehidupan manusia lingkungan juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan perkotaan karena dengan lingkungan sehat dan akan tercipta suasana perkotaan yang nyaman dan layak huni.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penanganan masalah lingkungan hidup dengan memberlakukan Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dituangkan kedalam Undang-undang no. 4 tahun 1982 yang merupakan piranti-sarana untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari segi hukum, yaitu yang mewajibkan setiap warga Negara, lembaga swasta maupun pemerintah untuk menjadikan kesadaran lingkungan hidup sebagai suatu disiplin nasional<sup>5</sup>.

Pemerintah pusat memberikan keleluasaan terhadap pemerintahan daerah untuk mengembangkan penanganan terhadap masalah lingkungan hidup. Pada pasal 18 ayat 2 UU No. 4 tahun 1984 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di daerah dilakukan oleh dan atau di bawah

<sup>1</sup> Menurut Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan Hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Soerjani, Moh dkk. 1987. *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta : IU – Press

<sup>2</sup> *Ibid*, Emil Salim dalam surat kabar "Surabaya Post"

<sup>3</sup> Dick, Howard. 1997. *Balance Development : East In The New Order*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Halaman 457

<sup>4</sup> Menurut T.G. McGee, *Extended Metropolitan Region (EMR)* yakni sebuah kawasan perkotaan yang amat luas dengan jumlah penduduk besar melebihi ukuran metropolitan. Purnawan Basundoro. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman : Sejak Zaman Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta : Ombak Halaman 113

<sup>5</sup> H.H. Koeswadji. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Peraturan Perundangannya (I)* dalam "Surabaya Post" Pada Tanggal 8 Juni 1987

koordinasi kepala wilayah dalam kaitan keterbaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 18 ayat 3 telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan hidup di daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku<sup>6</sup>. Atas dasar keputusan pemerintah inilah, mendorong usaha Wali Kotamadya Surabaya Poernomo Kasidi untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang akan menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan nyaman dan layak huni di perkotaan Surabaya.

Poernomo Kasidi adalah salah satu Walikota Surabaya yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Poernomo Kasidi dalam perbaikan lingkungan hidup, membuat Surabaya mendapatkan penghargaan tertinggi di dalam bidang lingkungan hidup yaitu Adipura dan Adipura Kencana secara berturut-turut. Pemerintah memberikan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup tersebut untuk memberikan dorongan dan rangsangan terhadap kebersihan kota, tidak sekedar untuk mendapat predikat kota terindah tetapi juga tetap menjaga kebersihan dan keindahan kota secara berlanjut. Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil judul "*Surabaya Sebagai Kota Adipura pada Masa Kepemimpinan Poernomo Kasidi 1984 – 1994*".

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interperstasi dan historipgrafi. Tahap pertama adalah heuristik, melalui tahap ini diperoleh sumber-sumber penelitian baik sumber primer dan sekunder.

Sumber primer pada penelitian ini adalah Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya, Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya yang diperoleh dari Badan Arsip dan Perputakaan kota Surabaya, Bagian Hukum – Seketariat Daerah Kota Surabaya, Koran Harian Surabaya Post pada tahun 1984 – 1994 yang diperoleh dari perpustakaan Medayu Agung Surabaya dan Data statistik yang diperoleh dari Badan Statistik Kota Surabaya. Sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perputakaan Daerah Kota Surabaya, dan Perpustakaan Balai Pemuda diantaranya adalah berupa buku-buku yang menunjang argument penulis.

Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, pada tahap ini diuji keabsahan dan keaslian sumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengujian terhadap

sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dengan memilah sumber-sumber yang berisi tentang informasi yang sesuai dengan tema penulisan yaitu pelestarian lingkungan hidup di Surabaya pada masa kepemimpinan Walikota Poernomo Kasidi. Data yang diperoleh kemudian dikaji kreadibilitas sumber dengan melalui kritik intern (menelaah isi) yang akan menghasilkan sebuah "fakta tunggal". Fakta tersebut yang akan dapat menjadi dasar untuk merekonstruksi sejarah.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini data-data primer maupun sekunder diinterpretasikan menjadi fakta sejarah dan disesuaikan dengan penelitian. Periodesasi data-data yang telah dikumpulkan penting untuk dilakukan pada tahap ini agar realitas dari peristiwa yang terjadi pada masa tersebut dapat disusun secara berkesinambungan. Bantuan konsep-konsep dari lintas ilmu dapat digunakan dalam kegiatan ini.

Langkah terakhir adalah melakukan penulisan atau historiografi. Dalam penulisan Historiografi penulis memaparkan hasil penafsiran kedalam bentuk tulisan sejarah. Usaha ini dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif sehingga objek yang dijadikan bahan kajian menjadi lebih hidup, dan fakta yang ada tidak hanya merupakan kesan serta sekedar ingatan belaka

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai negara melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan peningkatan teknologi dan industry serta sumber daya alam. Tetapi dalam perkembangannya, peningkatan teknologi dan industry mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia bahkan terhadap kualitas hidup manusia itu sendiri.

Pemerhatian terhadap lingkungan hidup dalam bentuk hukum pertama kali dilakukan di Stockholm, swedia, dengan dilaksanakannya konferensi Stockholm pada tanggal 5 – 16 Juni 1972. Negara di bagian swedia ini sadar akan bahaya diabaikannya lingkungan dan bahaya menguras sumber daya alam secara berlebihan ataupun secara tidak bijaksana. PBB secara khusus mengadakan konferensi untuk membahas masalah lingkungan hidup manusia di Stockholm dan menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang juga menjadi salah satu dari anggota internasional PBB tidak lepas dari peranannya terhadap masalah lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Indonesia adalah Negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun masih bersifat terbatas. Pembangunan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

<sup>6</sup> H.H. Koeswadji. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Peraturan Perundangannya (II)* dalam "Surabaya Post" Pada Tanggal 9 Juni 1987

kehidupan Negara dan masyarakat karena keberlangsungan pencapaian pembangunan di Indonesia tergantung kepada tingkat sumber daya alamnya serta kelestarian lingkungan hidupnya. Dalam usaha pencapaian pelaksanaan pembangunan yang seimbang dengan pemberdayaan lingkungan, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa pemerintah berhak mengambil kebijakan guna untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat secara sadar ikut melestarikan lingkungan alam serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam mendorong masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, maka pemerintah memberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pemerintah memberikan penghargaan kalpataru sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perorangan yang mampu dengan sadar berjasa dalam melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta penghargaan Adipura sebagai bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah kepada kota di Indonesia yang berhasil menjaga kebersihan dan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Bagi bangsa Indonesia, pembangunan bukanlah hanya kegiatan membangun fisik seperti pabrik, jalan, saluran irigasi, sekolah maupun barang material lainnya tetapi hakikat pembangunan yang paling penting adalah tertuju pada diri masyarakat Indonesia sendiri, kesadaran akan pentingnya keselarasan antara masyarakat dan lingkungan hidupnya akan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya.

### **B. Pola Kepemimpinan Poernomo Kasidi**

Poernomo Kasidi adalah salah satu Walikota Surabaya yang telah memimpin Surabaya selama dua periode yaitu pada repelita IV (1984 – 1989) dan Repelita V (1989 – 1994). Poernomo Kasidi lahir di Jakarta pada 22 September 1933, beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1964 kemudian bekerja di tambang timah Bangka. Satu tahun kemudian, beliau menduduki kursi perwira kesehatan resimen 1431 Kendari. Setelah menjabat sebagai ketua Bakorkesda dan Ka-LKB ABRI Jatim 1984, Poernomo Kasidi memperoleh tugas baru sebagai Walikotaamadya Surabaya dengan menggantikan Kol. CPM Drs. Moehadji (alm). Poernomo Kasidi juga merupakan seorang tokoh militer yang pernah bertugas sebagai dokter umum Angkatan Darat yaitu pada Angkatan Darat Republik Indonesia (ABRI).

Dalam kepemimpinannya, Poernomo Kasidi hanya menjalankan program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat dan beliau hanya sebagai pelaksanaan teknis pembangunan di tingkat daerah. Poernomo Kasidi adalah sosok Walikota yang peduli terhadap lingkungan. Kegiatannya mengontrol masyarakat secara langsung di lapangan membuat Walikota yang sering disapa “*pak Poer*” ini banyak dikenal oleh masyarakat Surabaya. Dalam hal pembangunan yang menyeimbangkan lingkungan hidup, Poernomo Kasidi adalah Walikota yang sangat peduli terhadap permasalahan sampah dan kebersihan kota. Pemeritahannya diprioritaskan pada pembangunan kota yang berbasis penghijauan. Kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh Poernomo Kasidi, membuat beliau menyandang julukan sebagai “*Walikota Got*” dari masyarakat Surabaya.

Masyarakat dan pemimpin adalah suatu kesatuan dalam menentukan perkembangan sebuah kota karena kepemimpinan dan perkembangan masyarakat hanya dapat terjadi bila terdapat kesesuaian antara individu pemimpin dan lingkungan masyarakat yang dipimpin. Berpusat dari paradigma kepemimpinan tersebut, maka Poernomo Kasidi dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan menggunakan tipe kepemimpinan yang menggambarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin yaitu dengan menggunakan tipe kepemimpinan yang transaksional dan kepemimpinan yang transformatif dalam mendekati diri pada masyarakat.

Kepemimpinan transaksional adalah pemimpin berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan kreativitas bawahannya. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memberikan inspirasi dan rangsangan serta bertugas memotivasi bawahannya agar dapat berprestasi melampaui harapan dan perkiraannya. Kepemimpinan transaksional menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan<sup>7</sup>. Pola kepemimpinan transaksional yang terlihat pada sosok Poernomo Kasidi adalah dengan kesediaannya mendengarkan kritik-kritik dari masyarakat. Beliau mengajak warga Surabaya untuk ikut berperan serta dalam degub-degub pembangunan kotanya, memanfaatkan staf ahli dari beberapa kalangan, dan menerima serta memanfaatkan kritik-kritik dari warga Surabaya. Poernomo Kasidi selalu berusaha menyelami karakter kota dan warganya dengan melalui dialog-dialog *Suroboyoan* dengan turun langsung ke lapangan menemui warganya.

<sup>7</sup> Utami Dewi. *Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia : Transaksional atau Transformatif ?*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS : UNY

Poernomo Kasidi selain memiliki pola kepemimpinan yang transaksional juga memiliki pola kepemimpinan transformatif. Pola kepemimpinan transformatif menekankan pada seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab lebih dari yang mereka harapkan<sup>8</sup>.

Dalam mengelola kepemimpinannya, Poernomo Kasidi selalu mengedepankan interaksi serta kualitas kinerja dari berbagai stafnya dan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan yang sama yaitu membangun kota Surabaya. Pembangunan kota Surabaya tidak hanya karena pola kepemimpinannya tetapi juga karena juga karena tingkat partisipasi masyarakat dalam mendorong keberhasilan dalam pembangunan. Perkembangan masyarakat kota dipandang sebagai produk kumpulan kondisi (*aggregate conditions*), sedangkan pemimpin merupakan produk perkembangan masyarakat tersebut. Perkembangan suatu kota akan terjadi apabila terjadi keselarasan antara pemimpin dan lingkungan masyarakatnya

Poernomo Kasidi adalah sosok Walikota yang tegas, mau menerima kritikan dan saran dengan terbuka serta berpenampilan apa adanya/tidak dibuat-buat. Beliau memiliki gaya pemaarah, namun tindakan pemaarahnya merupakan antisipasi agar orang berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Gaya Walikota Poernomo Kasidi tersebut identik dengan sifat *areg suroboyo* yaitu berani menghadapi tantangan, namun mempunyai strategi dan titik trobosan persoalan. *Suro wani boyo pakewuh*.

Sebagai seorang dokter militer, Poernomo Kasidi menerapkan ilmunya terhadap perbaikan lingkungan dan kebersihan di Surabaya. Tindakan pertamanya adalah mendiagnosis sistem pemerintahan kota, lalu kemudian melakukan pembedahan terhadap permasalahan. Baginya, kota merupakan subsistem dari suatu hubungan timbal balik. Jika satu sistem lumpuh, maka satu sistem lainnya tidak akan berfungsi dan berakibat fatal. Dalam menangani masalah kebersihan, beliau menerapkan falsafah harmonisasi yaitu hubungan timbal balik, karena perintah kota merupakan subsistem dari masyarakat. Secara umum baginya, program kebersihan bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar terbiasa hidup dalam lingkungan yang bersih sehingga tercipta keadaan kota yang layak huni, serta mampu mendorong masyarakat berkarya dan kreatif.

### C. Kondisi Fisik Kota Surabaya

Surabaya merupakan suatu kawasan yang secara astronomis terletak pada garis 112°36' - 112°54' Bujur timur dan garis 07°12' - 07°21' Lintang selatan<sup>9</sup>. Dilihat

dari segi topografis, Wilayah Surabaya merupakan suatu dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan laut. Dari kondisi geografis Surabaya yang terletak didataran rendah menjadikan Surabaya identik dengan cuaca yang panas. Kondisi daratan Surabaya yang berupa dataran rendah juga mempunyai potensi untuk menjadi kawasan industri.

Secara administrative, batas wilayah kota Surabaya yaitu di sebelah utara berbatasan dengan pulau Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejak dulu, kota Surabaya adalah salah satu kota yang mempunyai potensi baik dalam penyediaan dan sebagai media penghubung dalam pemasaran barang ke berbagai daerah.

Surabaya merupakan kota penting yang dalam sejarah perkembangannya selalu menjadi perhatian para pendatang. Pada masa kependudukan Negara asing di Indonesia, Kawasan Asia Tenggara memiliki dua kawasan yang sangat penting sebagai kota maritime yaitu pelabuhan Singapura yang dulu dikuasai oleh Inggris dan Surabaya yang dikuasai oleh Belanda hingga kependudukan Jepang, Surabaya sarat dengan perebutan kekuasaan. Pada zaman kependudukan Jepang, Surabaya dijadikan sebagai pangkalan maritime yang mendukung operasi militernya ke Rabaul di Papua Nugini. Keberadaan pelabuhan Singapura dan Surabaya digambarkan sebagai penjaga Asia Tenggara. Singapura terdapat di sebelah barat dan Surabaya di sebelah timur<sup>10</sup>.

Surabaya yang berada dalam lingkup strategis, selain sebagai pintu gerbang keluar Jawa juga merupakan tempat sebagai pelabuhan utama di Jawa Timur dengan menggantikan kedudukan Kabupaten Gresik yang semula merupakan pelabuhan penting pada abad ke-16<sup>11</sup>. Surabaya menjadi tempat berkumpulnya pedagang besar yang melakukan aktivitas perdagangan besar antar kota maupun Negara hingga beberapa diantaranya menjadikan Surabaya sebagai tempat tinggal. Surabaya mendominasi perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur dan jaringan komersialnya sampai ke Singapura dan Asia Timur<sup>12</sup>. Surabaya berada di pertemuan antara daerah lumbung padi Brantas Hilir dengan wilayah industri. Ia juga termasuk dalam perencanaan perluasan wilayah pengembangan oleh pemerintah yaitu Gerbang

<sup>10</sup> Roeslan Abdulgani. 1985. *Posisi Maritim – Strategis Kota Surabaya 40 Tahun Yang Lalu* dalam "Surabaya Post" Pada 30 Juni 1985

<sup>11</sup> Costressau, Armando. *The Suma Oriental Of Tome Pire (1515) : An Account Of The East From Red Sea To Japan, Written In Malaca And India* (London : Hakluyt Society, 1941) Halaman 192 - 193

<sup>12</sup> Dick, Howard. 1997. *Balance Development : East In The New Order*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Halaman 457

<sup>8</sup> *Ibid*, Dewi Utami

<sup>9</sup> Data berdasarkan pada tahun 1984. BPS Surabaya. 1985. Surabaya dalam Angka 1984-1985. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya Halaman 1

Kertosusilo (Gersik – Bangkalan – Kertono – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) yang dimaksudkan sebagai wadah pengembangan daerah yang menyongsong pengembangan kota masa depan. Potensi yang dimiliki Surabaya sebagai jalur perdangan adalah dengan adanya muara kali mas. Kali mas merupakan urat nadi pelayaran dan perdangan yang penting bagi Surabaya.

Wilayah perekonomian yang strategis mendorong Surabaya berkembang sebagai pusat-pusat kegiatan seperti pusat pemerintahan, perindustrian, perdagangan, perbankan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, keagamaan dan sebagainya menjadikan Surabaya luas akan lapangan pekerjaan. Kota Surabaya yang berkembang sebagai kota metropolitan dan kota industri, menjadikan kota Surabaya sebagai salah satu tujuan utama arus urbanisasi sehingga memicu kepadatan penduduk. Kota Surabaya memiliki *magnitude* (tarikan) yang kuat untuk terus menyerap penduduk dari *hinterland* (daerah pedalaman) Jawa Timur.

Arus urbanisasi yang terus meningkat akan menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks. Pertambahan penduduk menuntut pula pertambahan atas kebutuhan produktif dan konsumtif, karena penduduk yang bertambah akan menambah pula kebutuhan akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, pertambahan penduduk juga akan berdampak peningkatan gaya hidup maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut sumber alam dikelola melalui pembangunan. Hal ini akan menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Urbanisasi juga menuntut terpenuhinya lahan huni sedangkan ketersediaan lahan huni di kota terbatas pada pemakaian dalam pemanfaatan tanah sebagai sumber penyedia.

Bagi Negara yang sedang berkembang masalah kompleks yang dihadapi di dalam kotanya adalah masalah kemiskinan, termasuk di kota Surabaya. Kemiskinan adalah faktor yang mendorong penduduk untuk menguras alam sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemiskinan akan mendorong mereka untuk berusaha memanfaatkan sebagai sumber kehidupan tanpa memikirkan dampaknya misalnya seperti membuka hutan sebagai areal persawahan dan hunian, sedangkan mereka yang ingin merubah kehidupan akan melakukan migrasi ke kota besar untuk mencoba peruntungan secara ekonomi. Masyarakat yang melakukan migrasi ke kota besar seperti Surabaya tanpa di bekali dengan material dan pengetahuan akan menimbulkan tingginya angka penduduk yang tidak produktif dibandingkan dengan penduduk yang produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya gelandangan, pengemis, pemungut putung, kejahatan dan sebagainya. Begitu juga yang terjadi dikota besar seperti Surabaya. Kurangnya lahan di Surabaya juga akan mendorong masyarakat miskin untuk

menghuni kampung-kampung liar yang cenderung kotor dan beberapa menghuni sepanjang bantaran sungai. Sungai-sungai menjadi kotor karena dimanfaatkan penduduk sebagai tempat pembuangan sampah juga menambah tingkat kerusakan lingkungan di kota besar. Adanya kampung-kampung liar dan masyarakat miskin akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan kota.

Surabaya yang telah menjadi kota industri juga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan karena limbah buangan yang tidak di filter terlebih dahulu akan berdampak pada pencemaran lingkungan terutama sungai. Selain itu, industri juga dapat mencemari udara dengan polusi yang dihasilkan oleh pabrik. Hal tersebut akan menambah peningkatan kerusakan lingkungan di Surabaya. Kerusakan dan ketidakseimbangan antara lingkungan dan pembangunan akan menjadi menghambat terlaksananya pembangunan di Surabaya.

#### **D. Implementasi Kebijakan Walikota Poernomo Kasidi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

##### **1. Program Perbaikan Rumah Rakyat dan Lingkungan Pemukiman**

Penyediaan rumah merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan manusia. Di daerah kota Surabaya, jumlah penduduk yang relative terus bertambah mendorong meningkatnya kebutuhan akan permintaan lahan huni. Kemajuan kota Surabaya menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam melakukan migrasi sehingga arus urbanisasi yang tidak lagi terbendung akan memicu permasalahan yang lebih kompleks yaitu ketersediaan lahan pemukiman. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan materi maupun pengetahuan serta kelangkaan lahan huni dapat menambah jumlah pemukiman penduduk yang menghuni kampung-kampung liar maupun bantaran sungai yang cenderung tidak dapat dikatakan layak sebagai tempat tinggal. Hal tersebut akan mengganggu keindahan dan kebersihan kota serta memperlambat dalam melakukan pembangunan.

Pemerintah melakukan program dalam mengatasi masalah kemiskinan dari segi perumahan dan pemukiman dengan mengupayakan perbaikan fisik permukiman kumuh melalui proyek KIP (*Kampung Improvement Project*) yang melakukan perbaikan dengan berupa perbaikan rumah kumuh, pembuatan jalan beton, saluran, pembangunan sarana air bersih, pembangunan rumah susun, rumah sewa dan sebagainya. Pembangunan rumah rakyat diperuntukkan bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah dengan harga yang terjangkau .

Keberhasilan program KIP terlihat pada tahun 1987, kampung banyu urip – putat jaya dipamerkan dalam pameran habitat forum di Berlin, Jerman yang membahas

tentang pemukiman penduduk berpenghasilan rendah. Acara ini menyambut puncak tahun papan internasional (*internasional Year Of Skelter Of The Home*). Sebelum tersentuh oleh program KIP, kampung banyu urip – putat jaya adalah sebuah kampung yang tertutup oleh tumpukan sampah karena merupakan salah satu bekas tempat pembuangan sampah, bekas ratusan makam cina yang telah dinyatakan tutup pada tahun 1968 dan sejumlah rumah-rumah bambu yang sederhana serta digunakan sebagai areal prostitusi.

Pameran kampung banyu urip – putat jaya dilakukan untuk menunjukkan perubahan lingkungan pemukiman yang pada awalnya adalah kondisi yang memprihatikan menjadi membanggakan karena dengan adanya partisipasi masyarakat yang bersedia berpartisipasi dalam bentuk material seperti persetujuan pelebaran jalan yang memakan sedikit lahan huninya, penertiban bangunan dan sebagainya. Kampung banyu urip – putat jaya bukan kali pertamanya dipamerkan dihadapan dunia tetapi juga pernah dipamerkan di kota Ankara, Turki, dan Medio pada bulan mei 1987.

Pada tahun 1987 Presiden Bank Dunia, Barber B. Conable mengunjungi kampung banyu urip – putat jaya dan terkesan dengan hasil perbaikan kampung tersebut<sup>13</sup>. Conable berpendapat bahwa ada perubahan sikap sosial, ekonomi, dan budaya ke arah yang positif. Pada tahun ini juga Surabaya mendapatkan penghargaan *Aga Khan Award for Architecture* untuk kampung kebalen karena berhasil mempertahankan arsitektur islamnya, dan Banyu urip terkenal karena prestasi warganya memperbaiki lingkungan pemukimannya.

Selain memperbaiki lingkungan permukiman, pemerintah daerah juga menggalakkan program pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang belum memiliki rumah pribadi. Pengandaan rumah susun, didasarkan pada alasan penghematan lahan dan kemampuan daya tampung atau kapasitas yang tinggi daripada bangunannya. Susunan program rumah susun meliputi unit rumah susun perantai, selaras atau corridor, halaman, ruang tangga, teras/balcon, dapur bersama, KM/WC bersama, fasilitas/sarana penunjang kompleks rumah susun seperti tempat ibadah, pos kesehatan, ruang terbuka, telepon umum, dan sarana air bersih PDAM.

Pada tahun 1988, pemerintah daerah bersama KIP urban V mendirikan rumah susun sewa bagi pekerja. Pembangunan rumah susun sewa adalah untuk mengatasi masalah pemukiman yang dihadapi buruh dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pembangunan menggunakan dana bantuan dari Bank Dunia yang disalurkan melalui APBN. Pada tahun 1988, rumah susun

sewa dibangun di bangusari – bangunrejo jalan dupak karena penghuni disana adalah sebagai besar menempati rumah sewa yang cenderung kumuh. Pada tahun 1990, pemerintah kembali melakukan pembangunan rumah susun sewa Sombo di jalan Sombo dan melakukan peremajaan kepada beberapa kawasan kumuh di Surabaya. Pada tahun 1992, pemerintah daerah membangun rusun panjaringansari untuk masyarakat yang terkena dampak proyek pelebaran saluran dan proyek jembatan kembar di jagir. Selain itu juga dibangun rumah susun di jalan urip Sumaharjo.

Keberhasilan Surabaya dalam program KIP dengan sasaran pembenahan pemukiman kumuh hingga pada tahun 1988 diadakan seminar perbaikan kampung di daerah pinggiran (*fringe are*) KIP urban V yang diseminarkan pada tingkat internasional ESCAP di Bangkok pada bulan juni 1988. Selain itu selama tanggal 10 hingga 15 oktober 1988, diselenggarakannya workshop *On Kampung Inprovement And Integrated New Settlement Escap 88* di Surabaya yang membahas tentang keberhasilan KIP, terutama peran masyarakat karena perbaikan kampung KIP selalu melibatkan paling sedikit 30% - 40% tambahan dana yang berasal dari sumber daya warga setempat. Keberhasilan partisipasi warga dalam pembangunan kemudian dibahas dalam seminar *Economic Development Institute The World Bank* dan *United Nation Centre For Regional Development* di kuala lumpur pada bulan juni 1988<sup>14</sup>.

Keberhasilan Surabaya dalam menangani masalah pemukiman kumuh membuat pemerintah pusat menjadikan Surabaya sebagai proyek contoh kredit perbaikan rumah kumuh pada tahun 1989. Pemerintah pusat menunjuk pemerintah daerah Surabaya sebagai pelaksana program bantuan kredit rumah di kawasan kumuh. Proyek kredit perbaikan rumah kumuh adalah satu-satunya di indonesia dan akan menjadi contoh nasional.

Perbaikan dan pembangunan kampung serta rumah susun adalah langkah pemerintah untuk dapat lebih menertibkan lingkungan dan membangun lingkungan yang lebih rapih dan nyaman sehingga dapat meningkatkan pembangunan kota yang menyeimbangkan dengan alam.

## 2. Program Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota

### a. Satuan Petugas Kebersihan (Pasukan Kuning)

Pada tahun 1987 pemerintah daerah membentuk satuan petugas kebersihan bagi kota Surabaya yang dikenal dengan pasukan kuning. Satuan petugas

<sup>14</sup> Sambutan WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya pada penerimaan team Parasamya Purnakarya Nugraha Halaman 7 – 8

<sup>13</sup> *Ibid*

kebersihan kemudian disahkan dalam peraturan daerah No. 199 tahun 1987 tentang pembentukan satuan tugas kebersihan lingkungan Kotamadya daerah tingkat II Surabaya. Pasukan kuning pertama kali terbentuk pada oktober 1987 di kecamatan Krembangan. Pasukan kuning terbagi menjadi dua yaitu pasukan kuning yang membersihkan jalan protokol dan pasukan kuning yang bertugas membersihkan daerah pemukiman.

Pada tahun 1988, Pasukan kuning diterjunkan pada malam hari hingga pagi hari, khususnya di kawasan tujuh jalur tertib lalu lintas. Petugas di bagi menjadi tiga kelompok yaitu petugas bekerja mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB dan kelompok berikutnya bekerja dari pukul 01.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB serta petugas lainnya bekerja dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Dengan pembagian waktu, maka kebersihan dapat diawas dan dikontrol terus-menerus selama 24 jam. Surabaya pada tahun ini, memiliki tiga mobil penyapu jalan (*sweeper*) yang bekerja secara mekanis. Kapasitas mobil dapat menampung empat hingga lima meter kubik sampah.

Studi banding yang dilakukan oleh Ir. Rayas dan Drs. Cholik dari dinas kebersihan kota Surabaya di Jepang, menunjukkan bahwa 20 tahun lalu kondisi kota Osaka Jepang memiliki banyak permasalahan persampahan namun sekarang telah menjadi kota terbersih di Jepang. Perbedaan pengelolaan Jepang dan Surabaya adalah jika Jepang menggunakan trobosan budaya dan teknologi, maka Surabaya mempunyai ribuan pasukan kuning yang tidak dimiliki oleh masyarakat Jepang<sup>15</sup>.

Pada tahun 1989, Pasukan kuning bekerja dengan dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok pertama dan kedua bekerja mulai dari pukul 07.00 WIB pagi hingga pukul 17.00 WIB namun dikerjakan oleh pasukan kuning yang masih berstatus honorer sedangkan kelompok ketiga dan keempat bekerja mulai malam hingga pagi oleh karyawan KMS dengan pendapatan sebesar 1.000/harinya. Pasukan kuning mendapat pengobatan secara gratis dari pemerintah yang dilakukan di Klinik Pasura dan Unair, pasukan kuning juga mendapatkan asuransi jiwa serta bingkisan dan *vocher* nonton gratis di bioskop mewah ketika perayaan hari besar atau HUT Surabaya.

Kemenangan Surabaya meraih penghargaan Adipura mengantarkan peningkatan taraf hidup bagi satuan petugas kebersihan. Keberhasilan Surabaya dalam bidang lingkungan hidup tidak khayal adalah merupakan bagian dari peran pasukan kuning untuk mempertahankan kebersihan Surabaya. Pada tahun 1990, Surabaya yang telah berhasil meraih penghargaan ketiga kalinya

mendorong pemerintah memberikan apresiasi terhadap kontribusi personil pasukan kuning dengan menaikkan pendapatan atau honor petugas kebersihan sebanyak 50% dari Rp 1.000,00 menjadi Rp 1.500,00 setiap enam jam sehari<sup>16</sup>. Kenaikan pendapatan pasukan kuning juga selain untuk merangsang intensitas dalam bekerja tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### b. Paguyupan Mitra Pasukan Kuning (PMPK)

Pemulung mempunyai peran yang cukup dominan dalam mengatasi masalah kebersihan di dalam kota. Paguyupan mitra pasukan kuning adalah wadah dalam menunjang peran pemulung dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota serta menciptakan lapangan kerja mandiri dan meningkatkan sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah daerah mengesahkan melalui Keputusan Walikota nomor 17 tahun 1990 tentang organisasi dan pembinaan pemulung di wilayah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya yang disahkan pada 16 februari 1990. Pada awal pembentukannya, pemerintah telah dapat menghimpun sebanyak 3 ribu pemulung di seluruh wilayah Surabaya untuk dapat bergabung bersama paguyuban mitra pasukan kuning.

Paguyupan mitra pasukan kuning dibagi menjadi dua kelompok yaitu paguyuban di tingkat Kotamadya daerah tingkat II Surabaya disebut sebagai paguyuban mitra pasukan kuning tingkat kota madya yang dipimpin oleh pengurus paguyuban mitra pasukan kuning tingkat kota madya dan Paguyuban tingkat kecamatan disebut sebagai kelompok paguyuban mitra pasukan kuning kecamatan oleh ketua kelompok paguyuban mitra pasukan kuning kecamatan.

Para pemulung bekerja dengan berorientasi kepada tempat sampah sehingga berpengaruh terhadap volume sampah yang terbuang menjadi sedikit. Mereka akan mengambil sampah yang bernilai komersial sehingga satu orang pemulung dapat menghasilkan 3 ribu sampai 5 ribu rupiah per harinya. Penghasilan ini lebih besar dibandingkan dengan penghasilan pegawai negeri golongan III A pada tahun 1990<sup>17</sup>.

Sejalan dengan Keputusan Walikota yang mewajibkan adanya pembinaan, pengarahan dan petunjuk bagi para pemulung serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota PMPK. Mereka diperkenalkan pada diri dan lingkungannya serta bagaimana cara atau teori yang dilakukan oleh para pengepul dan barang bekas untuk melakukan transaksi jual beli. Pemisahan dan informasi harga resmi masing-masing barang akan menambah bekal tawar-menawar dengan pengepul. Hal ini dilakukan agar para pemulung dapat lebih jeli dalam

<sup>16</sup> Honor Pasukan Kuning Dinaikkan 50 Persen dalam "Surabaya Post" Pada 7 Juni 1990

<sup>17</sup> Bungkus Mentereng Pasukan Kuning dalam "Surabaya Post" Pada 9 Juni 1991

<sup>15</sup> Beda Surabaya dan Osaka Terletak di Pasukan Kuning dalam "Surabaya Post" Pada 9 Juni 1988

menentukan harga serta dapat menambah pendapatan perkapitanya.

Pemerintah daerah selain melaksanakan program bagi kesejahteraan pemulung namun juga melaksanakan alih profesi dan program transmigrasi. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat pemulung dan mengurangi angka kemiskinan di Surabaya yang akan berdampak pada ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.

### c. *Up Grading* taman dan Gerakan Sejuta Pohon

Surabaya yang sarat dengan wilayah strategis dalam jalur perekonomian membuat para investor tertarik untuk menjadikan kota Surabaya sebagai ladang usaha. Namun, perkembangannya bangunan-bangunan tersebut yang tidak diimbangi dengan ruang terbuka hijau akan menjadikan Surabaya sebagai kota gersang yang hanya ditumbuhi oleh hutan beton dan taman aspal.

Setiap pembangunan yang menggusur tanaman baik rumput, semak, maupun pepohonan yang tidak diimbangi dengan penggantian yang seimbang akan mengakibatkan terjadinya defisit sarana lingkungan yang dapat berfungsi sebagai menyerap pancaran sinar matahari, pembersih udara dari polusi dan debu, serta merendang kebisingan lalu lintas. Lingkungan tersebut tentu tidak akan baik bagi kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Surabaya, serta tidak sesuai dengan konsep pemerintah dalam melakukan pembangunan yaitu pembangunan yang diimbangi dengan lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah daerah sebagai langkah awal untuk menghidupkan kota dengan menyediakan beribu batang pohon yang akan disebar keseluruh wilayah Surabaya. Selain itu, pemerintah daerah melalui anggaran yang disediakan dan berkejasama dengan masyarakat melakukan *up grading* taman atau perbaikan dan perluasan terhadap eksibilitas taman.

Pada tahun 1989, Surabaya telah memiliki taman dengan jumlah luas keseluruhan sebanyak 488.419,88 m<sup>2</sup> yang tersebar pada 11 kecamatan di wilayah pembantu WaliKotamadya. Pada tahun 1990, Surabaya hanya memiliki taman seluas 466.212,43 m<sup>2</sup> yang tersebar 13 kecamatan dan hanya terdapat di 4 wilayah pembantu WaliKotamadya. Pada tahun 1991, luas taman di Surabaya mengalami peningkatan yaitu menjadi 486.965,06 m<sup>2</sup> lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di wilayah perkotaan, kehadiran tumbuhan terutama pohon yang mempunyai peranan yang cukup efektif sebagai penyaring debu dan penahan gerakan udara (angin). Pepohonan dan perdu yang memiliki daun lebar akan bermanfaat dalam penyaringan debu-debu yang berterbangan karena dampak dari berbagai industri dan lalu lintas.

Bertambahnya pembangunan komersial, pertambahan penduduk, perbaikan fasilitas umum seperti pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan serta tingginya permintaan lahan huni mendorong berkurangnya luas wilayah taman. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau mendorong munculnya ide dari gubernur Jawa Timur Soelarto untuk melakukan gembrakan dengan program gerakan penghijauan di Surabaya pada tahun 1992 yang kemudian oleh pemerintah dijadikan sebagai proyek nasional yang dikenal dengan sebutan program sejuta pohon.

Gerakan sejuta pohon dilaksanakan atas himbuan mantan menteri dalam Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) Emil salim yang dimulai pada November 1992, Penanaman pohon yang ke sejuta akan ditargetkan tercapai pada maret 1994. Gerakan sejuta pohon tersebut juga diimbangi dengan perbaikan dan pembenahan taman-taman. Langkah tersebut menjadi cara alternatif untuk dapat memperoleh pendapatan yang menunjang keterlaksanaan kebersihan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap kebersihan akan ikut memperindah taman, taman tidak hanya sekedar hijau namun kesadaran masyarakat untuk ikut merawatnya akan mempercantik kondisi taman.

### d. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Keberadaan pedagang kaki lima yang berada di pinggir-pinggir jalan juga merupakan salah satu permasalahan dalam keindahan dan kebersihan kota. Ketidaktertiban pedagang kaki lima serta perilaku para pedagang yang cenderung sering membuang sampah dagangannya sembarangan menjadi salah satu kelemahan dalam bidang kebersihan di kota Surabaya. Adanya pedagang kaki lima merupakan suatu bagian dari pengelolaan kota dan tidak bisa diabaikan keberadaannya.

Pada tahun 1987, sebanyak 17.412 pedagang kaki lima berada di Surabaya. Para PKL cenderung berjualan di pinggir-pinggir jalan dan trotoar serta keberadaannya di badan jalan nilai berdampak dalam mempersempit jalan dan membuat kemacetan lalu lintas. Para PKL banyak yang membuka lapaknya mulai pagi hingga malam sehingga selain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas juga dapat merusak estetika keindahan kota. Kehadiran PKL dianggap mengganggu estetika kota karena penampilan pedagang dan gerobak yang cenderung apa adanya serta terkesan tidak teratur dan terlihat kumuh. Dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima, pemerintah daerah mengeluarkan Keputusan guna untuk membina PKL agar dapat ikutserta dalam penyelenggaraan kebersihan kota.

Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dalam menangani permasalahan yang timbul akibat

adanya pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 1987, bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk membina, mengarahkan, dan menciptakan iklim usaha sebaik-baiknya bagi pedagang kaki lima. Pembinaan itu dilakukan untuk menciptakan kondisi Surabaya tidak hanya berseri tetapi juga Atlas (aman, tertib, lancar, dan serasi).

Pada tahun 1987, Pemerintah mengeluarkan peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya nomor 15 tahun 1987 tentang perubahan pertama peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya nomor 1 tahun 1981 tentang pemungutan uang leges yaitu pengeluaran surat izin pemakaian tempat usaha PKL. Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima, membuat pemerintah mengeluarkan ketentuan kepada para pedagang kaki lima untuk dapat memperoleh izin usaha dari pemerintah harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan surat Keputusan WaliKotamadya kepala daerah tingkat II Surabaya nomor 171 tahun 1989 tentang ketentuan untuk memperoleh izin usaha PKL di Kotamadya daerah tingkat II Surabaya.

Pada tahun 1990, Walikota mengeluarkan surat WaliKotamadya Surabaya kepada kantor koperasi Kotamadya dari II Surabaya nomor 510 tahun 1990 tentang persetujuan Walikota atas pembentukan koperasi PKL dengan mengambil daerah kerja wilayah kecamatan di wilayah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya.

Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan surat Keputusan Walikota kepala daerah tingkat II Surabaya nomor 220 tahun 1991 tentang pembentukan tim pembenahan dan pembinaan PKL Kotamadya daerah tingkat II Surabaya. Dengan dikendalikannya keberadaan PKL, tidak hanya akan mengurangi permasalahan bagi pemerintah tetapi penataan yang baik akan menambah keindahan kota dan akan dapat memberikan sumbangsi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.

#### e. Operasi Yustisi Kebersihan dan Sangsi Kebersihan

Penyelenggaraan kebersihan kota, belum dapat dipahami oleh sebagai masyarakat Surabaya. Di beberapa daerah perkotaan, kesadaran masyarakat mengenai persampahan masih terbilang rendah. Jumlah angkut sampah yang tidak sesuai dengan jumlah hasil sampah per harinya adalah bukti bahwa kesadaran masyarakat terhadap tingkat kebersihan masih kurang. Sampah yang tidak terangkut, berada ditempat yang tidak semestinya seperti sungai, dibakar maupun diselokan.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 1986 tentang tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kotamadya daerah tingkat II Surabaya, melarang pembakaran sampah di halaman atau tempat-tempat yang

membahayakan lingkungan, membuang sampah di sungai, saluran, trotoar, dan tempat umum lainnya. Termasuk pembuangan sampah yang berupa pecahan kaca, zat kimia, kotoran hewan, dan kotoran yang berbau busuk. Pelanggarannya akan diancam hukuman kurungan paling lama enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 sesuai berdasarkan dengan pasal 12. Warga yang kurang sadar atau sulit untuk diajak hidup bersih bukan hanya dari golongan ekonomi menengah saja, melainkan warga golongan elite yang masih banyak dijumpai membuang sampah sembarangan di jalan dari dalam kaca mobil. Namun, pemerintah daerah menekankan kepada pemberian motivasi dan ajakan yang bersifat edukatif kepada semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 1989, pemerintah daerah menggalakan polisional dengan melakukan operasi yustisi kebersihan. Operasi yustisi kebersihan merupakan operasi razia yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dan instansi pemerintahan yang berwenang untuk melakukan razia tangkap tangan terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang ditentukan. Operasi yustisi kebersihan adalah langkah pemerintah daerah untuk mengurangi angka pelanggaran kebersihan di daerah kota Surabaya. Operasi yustisi lebih ditekankan pada aspek pendidikan daripada hukumannya.

Pada tahun 1990, Perubahan pertama dari peraturan daerah nomor 6 tahun 1986 menjadi peraturan nomor 2 tahun 1990, mengikutsertakan perubahan terhadap sanksi bagi pelanggaran kebersihan di wilayah Surabaya. Peringatan sangsi tersebut dikarena sudah adanya operasi yustisi kebersihan yang sedang digalakkan. Berdasarkan pasal 250 KUHP, setiap pelanggar peraturan kebersihan akan langsung diadili dengan denda Rp 7.500,00 atau kurungan maksimal selama tiga bulan. Sebelum ada operasi yustisi yang menggunakan sistem tidak langsung, hukuman didasarkan atas peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1974.

Operasi yustisi kebersihan membuahkan hasil karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk keikutsertaan dalam penyelenggaraan kebersihan. Dalam perkembangannya, tanpa operasi yustisi-pun masyarakat Surabaya sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan timbul rasa malu dan bersalah ketika membuang sampah sembarangan.

#### f. Alat Pembakar Sampah (*Incenerrator*)

Volume sampah yang mencapai 8.000 m<sup>3</sup> per harinya di kota Surabaya mendorong pemerintah daerah untuk merencanakan pembelian alat pemusnah sampah (*incenerrator*). Pembelian *incenerrator* baru bisa direalisasikan pada tahun 1991. Penanggulangan masalah lingkungan dengan cara memusnakan sampah KMS setiap harinya mencapai 760 m<sup>3</sup> melalui pemakaian alat *incenerrator* yang dibangun di TPA keputih.

Namun, pada perkembangannya, alat ini tidak dapat membantu banyak untuk meringankan beban sampah karena alat ini hanya sedikit saja dalam melakukan membakar sampah. Menurut penelitian yang dilakukan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) di musim kemarau instalasi itu hanya membakar sekitar 100,5 ton per harinya atau hanya 6% dari total produksi sampah<sup>18</sup>.

#### g. Penggandaan Fasilitas Persampahan

Pemerintah menggandakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kebersihan. Karena kesadaran masyarakat tanpa diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan tidak akan berlangsung secara maksimal. Maka dari itu, penggandaan fasilitas kebersihan diberikan pemerintah daerah secara berkala untuk menunjang program kebersihan kota seperti penggandaan truk sampah, Gerobak Sampah, TPS/ depo, Shovel Loader, Alat-alat besar dan sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebersihan terlihat dari sumbangsi masyarakat terhadap penggandaan sarana kebersihan, seperti yang ditunjukkan oleh organisasi IKMS (Ikatan keluarga Madura Surabaya) yang beranggota sekitar 3.000 orang pada tahun 1989. Sebagai tanda keikutserta masyarakat Madura dalam pelaksanaan kebersihan kota Surabaya, organisasi IKMS menyerahkan bantuan dalam bentuk 4 buah alat pembersih rumput kepada Walikota Surabaya. Meskipun harganya dinilai tidak seberapa tapi besar kesadaran untuk ikut berperan dalam pelaksanaan kebersihan inilah yang bernilai tinggi<sup>19</sup>.

Pada tahun 1988 hingga maret 1989, Surat kabar Surabaya post mencatat ada 47 acara partisipasi masyarakat dalam sektor kebersihan yaitu penyediaan 169 bak sampah (satu meter kubik) yang diletakkan diberbagai sudut kota yang mencapai harga Rp 500.000 per buahnya, Satu unit patroli bantuan masyarakat, tong sampah 10.200, papan pengumuman himbauan dan larangan tentang perda kebersihan sekitar 1.500 buah, jas hujan 1.300 untuk pasukan kuning, kereta dorong sebanyak 29 buah dan lainnya<sup>20</sup>.

Penggandaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang keterlaksanaan program kebersihan karena sarana dan prasarana tersebut akan memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penggalakkan kebersihan. Selain itu, penggandaan sarana dan prasarana adalah bentuk nyata kerjasama dari pemerintah dan masyarakat.

#### h. Retribusi Kebersihan

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan kota Surabaya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat masih bersifat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya peningkatan peran masyarakat dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dalam bentuk pembayaran retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada seluruh pemakai persil<sup>21</sup> atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan kebersihan.

Pada awal tahun 1987, pungutan retribusi kebersihan hanya diperuntukkan bagi pelanggan PDAM sedangkan pemungutan retribusi kebersihan non pelanggan PDAM dimulai pada oktober 1987. Pelaksanaan pungutan retribusi kebersihan bagi pelanggan PDAM berdasarkan kepada surat Keputusan Wali Kotamadya Surabaya nomor 23 dan nomor 24 tahun 1987 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan bagi wajib retribusi yang telah berlangganan air bersih perusahaan daerah air minum dalam wilayah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya.

Pelaksanaan penagihan retribusi kebersihan dilakukan setiap bulan oleh petugas PDAM bersamaan dengan penagihan rekening pemakaian air bersih PDAM yang sekaligus akan tertulis dalam rekening pemakaian air bersih PDAM. Total dari hasil pungutan uang retribusi kebersihan sebanyak 25% oleh pemerintah daerah akan dikembalikan kepada masyarakat. Pembayaran wajib retribusi kebersihan baik pelanggan PDAM maupun non PDAM akan dapat menambah PAD (pendapatan asli daerah).

Pada tahun 1990, pemerintah daerah melakukan pembaharuan terhadap sistem retribusi kebersihan yang diatur pada peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya nomor 2 tahun 1990 tentang perubahan pertama peraturan daerah kota madya daerah tingkat II Surabaya nomor 6 tahun 1986 tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kotamadya daerah tingkat II Surabaya dan pemerintah melakukan perubahan untuk kedua kalinya bagi penetapan retribusi kebersihan pada tahun 1993 dalam peraturan daerah kota madya daerah tingkat II Surabaya nomor 16 tahun 1993 tentang perubahan kedua peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya nomor 6 tahun 1986 tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kotamadya daerah tingkat II Surabaya.

### 3. Program Kali Bersih (Prokasih)

<sup>18</sup> Soal 'Incinerator' Usai, Tanpa Revisi Perjanjian dalam "Surabaya Post" Pada 14 Juni 1993

<sup>19</sup> Kebersihan Kota Surabaya Juga Berkat Warga Madura dalam "Surabaya Post" Pada 2 Juni 1989

<sup>20</sup> Si Kuning Menuju Prestasi 'Berseri' dalam "Surabaya Post" Pada 7 Juni 1989

<sup>21</sup> Pemakai Persil adalah setiap kepala keluarga atau pemakai tempat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya nomor 2 Tahun 1990

Pelaksanaan pembangunan cenderung tidak diimbangi dengan keseimbangan kelestarian sungai akan berdampak pada pencemaran air di sungai. Pencemaran air di Surabaya disebabkan oleh adanya limbah industri dan limbah domestic. Secara kuantitas, limbah yang berada di wilayah Surabaya paling banyak berasal dari limbah domestic penduduk sebesar 62%, sedangkan limbah industri hanya 32% yang mencemari sungai. Wilayah Surabaya yang telah menjadi kawasan industri memicu pencemaran terhadap sungai karena banyak dari perusahaan industri tersebut yang membuang limbah produksinya ke sungai. Pertambahan penduduk juga akan menambah bertambahnya intensitas pencemaran sungai. Pemukiman penduduk tersebut yang menghasilkan limbah domestic. Pencemaran sungai yang menyebabkan menurunnya kualitas air sungai mendapat perhatian pemerintah, dan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya, maka pemerintah menetapkan Program kali bersih (*the river clean*) atau yang lebih dikenal dengan prokasih.

Program kali bersih pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1989. Kegiatan utama prokasih adalah berupaya untuk menurunkan dan mengurangi jumlah zat pencemaran yang masuk ke sungai. Tahap awal yang dilakukan terhadap industri yang mempunyai beban pencemaran yang tinggi baik industri kecil, menengah maupun besar. Tahap selanjutnya adalah memberi pengarahan dan penyuluhan baik pada kalangan industriawan maupun masyarakat sekitar sungai untuk tetap menjaga sungai agar tetap bersih dengan tidak membuang limbahnya ke sungai. Bagi industri yang harus membuang limbahnya ke sungai, harus melalui tahap-tahap sampai kandungan zat pencemaran di bawah ambang batas yang dapat dibuang ke sungai. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kelurahan itu sendiri adalah menanam bantaran sungai dengan tanaman TOGA, sementara yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah membersihkan dan menanam tanaman hias dan pohon di bantaran sungai yang ada di wilayahnya. Pemerintah daerah mendirikan fasilitas umum seperti *jongging track*, taman serta taman bermain anak-anak di tepi sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi.

#### **E. Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap kehidupan Masyarakat**

##### **1. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota**

Kebijakan pemerintah daerah Surabaya dalam menangani masalah lingkungan memiliki dua dampak yaitu dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap masyarakat. Meningkatnya usaha-usaha yang dilakukan Walikota Surabaya, mampu menciptakan peningkatan kebersihan dan keindahan di kota Surabaya.

Masyarakat yang ikut berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan kebersihan menjadi faktor utama keberhasilan Surabaya. Peningkatan kebersihan tersebut terlihat dari perubahan bentuk fisik kota Surabaya yang cenderung panas, kering, berdebu, serta berserakan sampah menjadi kota yang arsih, bersih, rapih, dan indah.

Perbaikan-perbaikan yang digalakkan Pemerintah Daerah juga menjadikan Surabaya sebagai kota yang rapih. Kampung-kampung kumuh ditata dan diperbaiki sehingga memperindah kampung Surabaya. Tidak ada satupun anak-anak di kampung yang menengadahkan tangan untuk meminta uang. Perbaikan saluran pampas berdampak pada pengurangan intensitas banjir di kota Surabaya. Masalah sampah, banjir, dan masalah kebersihan yang mengganggu lingkungan sekarang tidak menjadi problema lagi. Pemandangan yang rapih juga terlihat pada tempat-tempat sampah berwarna kuning di sepanjang jalan kota serta tembok-tembok jalan yang berwarna putih bebas dari graffiti yang menambah kesan elegan terhadap kota metropolitan yang sarat kesibukan kotanya.

Keberhasilan Surabaya dalam menjaga kebersihannya dan keindahan kotanya terlihat dari pendapat seorang pejabat konsultan jendral amerika serikat di Surabaya yaitu Peter F. Spalding yang akan menggantikan konsultan jendral sebelumnya, Lee O. Coldren di Surabaya. Kedatangan Spalding di Surabaya memberikan kesan baru yang menurutnya bahwa "*Surabaya Lebih Bersih daripada Washington*"<sup>22</sup>.

Kesadaran masyarakat dalam ikutserta bertanggung Jawab untuk menjaga lingkungan merupakan aspek yang paling penting dalam keberhasilan program kebersihan karena pada dasarnya Masyarakat adalah subyek penghasil sampah dan kesadaran masyarakat juga yang mampu untuk mengatasi permasalahan sampah itu sendiri. Pemerintah tidak hanya menekankan terhadap media (program) kebersihan namun lebih menekankan terhadap pelaku kebersihan itu sendiri yaitu masyarakat. Keberhasilan Surabaya dalam meningkatkan kebersihan menjadi salah satu pendorong para wisatawan (*tourist*) untuk berkunjung ke Surabaya dan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modal di Surabaya. Hal tersebut akan berdampak positif bagi Surabaya, kedatangan para wisatawan akan dapat membantu memperkenalkan Surabaya ke ranah dunia dan para investor akan mampu membantu Surabaya dalam menyukseskan pembangunan sebagai kota metropolitan. Dengan demikian, dampak fisik kota Surabaya dan dampak peningkatan peran masyarakat dalam ikut serta menjaga kebersihan akan berpengaruh terhadap laju

<sup>22</sup> Surabaya Lebih Bersih Daripada Washington dalam *Surabaya Post* Pada 25 Juni 1990

perkembangan pembangunan perkotaan di Surabaya karena melalui pembangunan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan.

## 2. Perolehan Penghargaan Adipura

Kebersihan Surabaya berhasil mengantarkan Surabaya meraih penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yaitu penghargaan Adipura dan Adipura Kencana. Adipura merupakan suatu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah bidang lingkungan hidup. Adipura mempunyai arti, yaitu *Adi* adalah Bersih, Sehat, dan Agung sedangkan *Pura* adalah Kota. Maka, kota Adipura adalah kota bersih, sehat, dan agung. Adipura di lambangkan sebagai supermasi keadian kota yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan keagungan.

Penghargaan Adipura adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kota-kota di Indonesia yang berhasil menjaga lingkungan dan menjadi kota terbersih. Penghargaan Adipura pertama kali di berikan oleh pemerintah pada tahun 1986 dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni. Pemerintah memberikan penghargaan kepada kota terbersih di seluruh Indonesia. Kota di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori, yaitu Kota Raya yang berpenduduk 1 juta jiwa ke atas, Kota Besar berpenduduk 500 ribu sampai 1 juta jiwa ke atas, dan Kota Sedang berpenduduk 200 ribu sampai 500 ribu jiwa.

Pada tahun 1986 dan 1987, Surabaya gagal dalam meraih penghargaan Adipura. Kegagalan dalam meraih penghargaan tersebut karena diakibatkan mewabahnya penyakit demam berdarah yang melanda di beberapa kecamatan, sehingga pencapaian nilai kreditnya lebih rendah<sup>23</sup>. Berkaca dari dua kali kegagalan Surabaya dalam meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup tersebut, membuat pemerintah daerah Surabaya berupaya semaksimal mungkin mengatasi masalah kebersihan seperti menanggulangi sampah, kesehatan dan ketertiban. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat merupakan aspek yang paling penting karena sebagai wujud partisipator dalam mewujudkan Surabaya berseri.

Usaha pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan kebersihan membuahkan hasil dengan diraihnya penghargaan Adipura untuk pertama kalinya bagi Surabaya pada tahun 1988. Adipura pada tahun 1988 adalah bentuk keberhasilan pemerintah dalam usaha memobilisasi dan menghimpun pasukan kuning.

Pada tahun 1989, Surabaya berhasil meraih penghargaan Adipura untuk kedua kalinya dengan nilai sebesar 880. Faktor partisipasi masyarakat yang menonjol

dan adanya perbaikan pemukiman dengan berdirinya rusun Sombo menjadi salah satu realita usaha pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota yang telah mengantarkan Surabaya untuk memperoleh penghargaan tertinggi dibidang lingkungan hidup untuk kedua kalinya.

Kota Surabaya kembali memperoleh supremasi tertinggi kebersihan kota tingkat nasional yaitu penghargaan Adipura untuk ketiga kalinya pada tahun 1990. Dalam perolehan penghargaan Adipura di tahun ini, kota Surabaya dinyatakan sebagai kota terbersih di seluruh pelosok nusantara. Usaha serta kegigihan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebersihan mengantarkan Surabaya kembali memperoleh penghargaan Adipura untuk ke empat kalinya pada tahun 1991.

Pada tahun 1992, harapan Surabaya untuk menyandang penghargaan Adipura Kencana akhirnya terwujud. Surabaya adalah satu-satunya yang memperoleh penghargaan Adipura Kencana dalam kategori kota raya di Jawa Timur dengan meraih nilai sebesar 860<sup>24</sup>. Pada tahun 1992, Surabaya tidak hanya mendapatkan penghargaan dari dalam negeri tetapi juga mendapatkan penghargaan dari luar negeri. Surabaya mendapatkan penghargaan kelas dunia yaitu *World Habitat Award* dari komisi lingkungan dan pembangunan PBB (UNCED) sebagai kota yang sangat besar perhatiannya dalam hal kebersihan dan pengelolaan limbah.

Surabaya kembali mempertahankan penghargaan Adipura Kencana untuk kedua kalinya pada tahun 1993. Surabaya memperoleh penghargaan Adipura Kencana untuk kategori kota metropolitan. Pada tahun 1994, Surabaya gagal dalam mempertahankan kencana. Kegagalan Surabaya dalam mempertahankan penghargaan Adipura ditenggarai karena pemerintah daerah kota Surabaya salah mengantisipasi musim hujan pada tahun ini sehingga tingkat kebersihan kota Surabaya menurun. Meskipun pada tahun 1994, Surabaya mengalami penurunan dalam bidang kebersihan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan dan usaha-usaha yang diterap dalam menanggulangi masalah kebersihan dan keindahan kota oleh WaliKotamadya Surabaya Poernomo Kasidi pada masa pengabdianya dari tahun 1984 hingga 1994 telah membuat Surabaya berhasil mendapat penghargaan baik dari luar negeri maupun dalam negeri di bidang lingkungan hidup dan kerbersihan. Diantaranya adalah *The Agae Khan Award for Architectur* (1986), *The United Nation Environment Programme*(1990), *Local Government Honours*

<sup>23</sup> Lolosnya Penghargaan Adipura karena Demam Berdarah dalam "Surabaya Post" Pada 24 Juni 1987

<sup>24</sup> Tiga Kota Berpeluang Raih Kencana dalam "Surabaya Post" Pada 4 Juni 1993

*Programme of The United Nations Conference On Environment and Development (1992), World Habitat Award 1991 Developing Country(1992)* serta penghargaan Adipura dan Adipura Kencana.

### 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Masalah kebersihan bagi kota Surabaya merupakan masalah yang rumit dan tidak mungkin dapat diatasi hanya dengan mengandalkan peran dari pemerintah daerah Kotamadya Surabaya tanpa adanya bantuan dari partisipasi masyarakat Surabaya itu sendiri. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat membantu separuh dari target yang diharapkan dalam program kebersihan. Maka dari itu, peran masyarakat dinilai sangat penting bagi terselenggarakannya program kebersihan tersebut. Peran masyarakat dapat membantu untuk melengkapi kebutuhan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain dapat menambah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan pelengkap kebersihan, peran masyarakat juga akan dapat meningkatkan pendapatan daerah kota Surabaya.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah melakukan intensifikasi pemungutan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya serta meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan pungutan, dan melakukan ekstensifikasi dengan menggali sumber pendapatn baru dan menjaring objek pajak atau retribusi yang baru.

Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan di bidang kebersihan seperti restribusi kebersihan, penataan pedagang kaki lima serta penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas segala bentuk pelanggaran hukum pemerintahan. Pemenuhan fasilitas yang disediakan pemerintah akan ikut menambah penerimaan pemasukan sistem keuangan pemerintah daerah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), aspek kebersihan menyumbang pemasukan pendapatan melalui retribusi daerah.

## PENUTUP

### Simpulan

Program pemerintah dalam menangani masalah perkotaan yang begitu kompleks berhasil mengantarkan surabaya menjadi kota metropolitan yang tidak hanya sarat dengan kesibukan dan polusi tetapi dapat menjadi kota yang indah dan rapi. Surabaya yang berhasil menjadi kota Indamardi (Industri, perdagangan, maritime, dan pendidikan) serta Keberhasilan dalam mengelola kebersihan kota Surabaya, bukan saja hanya akan mendapatkan pengakuan melalui bentuk supremasi penghargaan tingkat nasional maupun tingkat internasional tetapi kebersihan surabaya juga akan ikut serta berperan dalam mendorong laju pembangunan karena melalui pembangunan, taraf hidup masyarakat perkotaan akan mengalami peningkatan.

## Saran

Keberhasilan kebersihan di masa lalu dapat menjadi acuan bagi rencana dalam pelaksanaan program kebersihan di masa yang akan datang. Dari kerberhasilan masa lalu, Surabaya tumbuh menjadi kota yang bersih dan elegan di masanya di dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini juga akan menjadikan semangat baru bagi generasi-generasi penerus yang akan melestarikan lagi budaya kebersihan di Surabaya.

Penelitian mengenai kebijakan kebersihan di Surabaya dalam cangkupan pemerintahan Walikotamadya Poernomo Kasidi tersebut masih dapat di katakana kurang. Data dan hasil penalaran yang sangat terbatas menjadikan penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan di kesempatan yang akan datang penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Surabaya pada masa Walikota Poernomo Kasidi dapat dikembangkan dengan konsepsi yang lebih matang sehingga pengetahuan yang didapatkan-pun dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat-surat

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 251 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Pembinaan Pemulung Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sambutan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya pada Penerimaan Team Parasamya Punakarya Nugraha.

Surat Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Jawa Timur perihal tentang Penertiban dan Pengamanan Kali Surabaya Kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya tanggal 24 Agustus 1989.

### Surat Kabar

“Walaupun Nilainya Tinggi, Surabaya Gagal Raih Adipura” *Surabaya Post* 5 Juni 1986

- “Banyu Urip – Putat Jaya Tampil di Pameran Dunia”  
*Surabaya Post* 2 Juni 1987
- “Lolosnya Penghargaan Adipura Karena Demam Berdarah” *Surabaya Post* 24 Juni 1987
- “Beda Surabaya dan Osaka Terletak di Pasukan Kuning”  
*Surabaya Post* 9 Juni 1988
- “Tetap, Sanksi Denda Bagi Pembuang Sampah”  
*Surabaya Post* 11 Juni 1988
- “Bakal Didirikan, Rumah Susun Sewa Bagi Pekerja”  
*Surabaya Post* 15 Juli 1988
- “Rumah Susun Sewa Segera Dibangun di Bangunsari”  
*Surabaya Post* 20 Juli 1988
- “Kebersihan Kota Surabaya Juga Berkat Warga Madura”  
dalam *Surabaya Post* dalam 2 Juni 1989
- “Surabaya Pertahankan Adipura” *Surabaya Post* 3 Juni 1989
- “Si Kuning Menuju Prestasi ‘Berseri’” dalam *Surabaya Post* Pada 7 Juni 1989
- “Surabaya Jadi Proyek Contoh Kredit Perbaikan Rumah Kumuh” *Surabaya Post* 17 Juni 1989
- “Kesadaran Pemulung Punya Andil Pertahankan Adipura” *Surabaya Post* 2 Juni 1990
- “Kamar Mini Warnai Rumah Susun Sewa Sombo”  
*Surabaya Post* 14 Juni 1990
- “Surabaya Lebih Bersih Daripada Washington” *Surabaya Post* 25 Juni 1990
- “Bungkus Mentereng Pasukan Kuning” dalam *Surabaya Post* Pada 9 Juni 1991
- “KMS Yakin Raih Adipura Kencana” *Surabaya Post* 18 Juni 1992
- “Tiga Kota Berpeluang Raih Kencana” dalam *Surabaya Post* Pada 4 Juni 1993
- “Surabaya Pertahankan Adipura Kencana” *Surabaya Post* 5 Juni 1993
- “Adipura Kencana II Keberhasilan Warga” *Surabaya Post* 7 Juni 1993
- “Poernomo Kasidi : Kebersihan Surabaya Menurun Tapi Optimis Raih Adipura, *Surabaya Post* 4 Juni 1994
- “Poernomo Kasidi : Pemda KMS Salah Antisipasi”  
*Surabaya Post* 6 Juni 1994
- “Soal ‘incinerator’ Usai, Tanpa Revisi Perjanjian”  
*Surabaya Post* 14 Juni 1994

#### Jurnal

- Armando Costressau. *The Suma Oriental Of Tome Pire (1515) : An Account Of The East From Red Sea To Japan, Written In Malaca And India* (London : Hakluyt Society, 1941)
- Happy Santoso. Oktober 2000. *Environmental Management In Surabaya With Reference To National Agenda 21 And The Social Safety Net Programme* Jurnal Environment & Urbanization Vol 12 No 2,
- Sri Utami Setyowati. Agustus 2004 “*Penataan Pedagang Kaki Lima Dengan Memanfaatkan Ruang Luar Dipusat Kota (Kasusu : Pedagang Kaki Lima DI Taman Surya Surabaya)* : Neutron Vol 4 No 2
- Utami Dewi. *Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia : Transaksional atau Transformatif ?*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS : UNY

#### Artikel Koran

- Emil Salim. *Ekonomi Pembangunan*. Surabaya Post 21 Juni 1986
- Forum Tinjauan Ekonomi. *Tiga Pola Pikir Industrilisasi Di Indonesia*. Surabaya Post 23 Juni 1985
- Johan Silas. *Surabaya Kota Hijau*. Surabaya Post 26 Juni 1986
- Koeswadi. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Peraturan Perundangan (I)*. Surabaya Post 8 Juni 1987
- Koeswadi. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Peraturan Perundangan (II)*. Surabaya Post 9 Juni 1987
- Ramlan Surbakti. *Pola Kepemimpinan Wali Kotamadya Pengaruhi Perkembangan Masyarakat* dalam “*Surabaya Post*” Pada 20 Juni 1994
- Roeslan Abdulgani. 1985. *Posisi Maritim – Strategis Kota Surabaya 40 Tahun Yang Lalu* dalam “*Surabaya Post*” Pada 30 Juni 1985

#### Buku

- Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang : Sejak Zaman Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta : Ombak
- BPS. 1987. *Surabaya Dalam Angka 1987*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1988. *Surabaya Dalam Angka 1988*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1989. *Surabaya Dalam Angka 1989*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1990. *Surabaya Dalam Angka 1990*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1991. *Surabaya Dalam Angka 1991*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1992. *Surabaya Dalam Angka 1992*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1993. *Surabaya Dalam Angka 1993*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- BPS. 1994. *Surabaya Dalam Angka 1994*. Surabaya : BPS Kotamadya Surabaya
- Dick, Howard, James J. Fox, dan Jamie Mackie. 1997. *Pembangunan Yang Berimbang : Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Terjemahan : Balanced Development : East Java in the New Order, Diterjemahkan Oleh : Bambang Sumantri). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Soerjani, Mohammad, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir. 1987. *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Thohir, Kaslan A. 1985. *Butir-Butir Tata Lingkungan*. Jakarta : Bina Aksara